

## **STRATEGI INTEGRASI ORANG BUTON DAN ORANG WAKAL DI DUSUN WA HATU NEGERI WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Raihan Sopamena, Hermien L. Soselisa, Wellem R. Sihasale, Suleman Angkotasan  
Program Studi Sosiologi Pascasarjana  
Universitas Pattimura

[hermien2018@gmail.com](mailto:hermien2018@gmail.com), [sihasalewellem@gmail.com](mailto:sahasalewellem@gmail.com), [suleman19mei62@gmail.com](mailto:suleman19mei62@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi integrasi orang Buton dan orang Wakal di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajemukan yang terdapat pada masyarakat di Maluku yaitu kemajemukan antara warga asli dan warga pendatang. Warga pendatang tersebut terdiri dari berbagai macam suku di tanah air seperti Jawa, Bugis, Buton, Sumatera, dan suku bangsa lainnya. Para pendatang telah mengalami sebuah proses adaptasi dan interaksi dengan warga asli atau dengan sesama warga pendatang lainnya. Warga pendatang merupakan orang-orang yang datang dari luar daerah dengan berbagai macam kepentingan dan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, tinggal serta menetap di daerah tertentu. Sebagaimana yang tampak di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah. Negeri Wakal, sejak dahulu telah didiami oleh suku asli. Pada tahun 1940, warga pendatang yang berasal dari Buton masuk dan mendiami daerah tersebut, khususnya pada dusun Wa Hatu. Kedatangan warga atau Orang Buton diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat di Negeri Wakal. Hubungan kawin-mawin antara Orang Buton dengan warga asli merupakan salah satu bentuk dari strategi integrasi yang dilakukan supaya dapat bertahan hidup di Dusun Wa Hatu. Strategi integrasi yang dilakukan telah membawa dampak positif sebab hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat asli Negeri Wakal dengan Orang Buton. Kehidupan kedua kelompok masyarakat ini terpelihara dengan baik dan menjalani kehidupan bersama tanpa ada perpecahan diantara mereka.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Suku, Adaptasi, Interaksi, Strategi, Integrasi.

This research was intended to find out and explain the Buton people and Wakal people integration strategies in the village of Wakal. The method of research used was qualitative research with the research site in the Wakal village. Research has shown that the plurality of society in Maluku is the plurality between natives and immigrants. These immigrants came to include a variety of ethnic groups such as Java, Bugis, Butons, Sumatra, and other nations. The immigrants have experienced a process of adaptation and interaction with the natives or with other immigrants. The immigrants were people who came from outside the village with various interests and different cultural backgrounds, living and settling in certain areas. As is seen in Wakal Village in Leihittu district, central Maluku. The land of Wakal has long been inhabited by natives. In 1940, immigrants from Buton entered the area, especially in the village of Wa Hatu. The arrival of the immigrants or Buton people was well-received by all the people of the Wakal village. The mating relation of the Buton people to the natives was one of the forms of the integration strategy employed to survive in the village of Wa Hatu. The integration strategy that was carried out has had a positive impact because until now there has never been a conflict between the indigenous people of the Wakal Country and the Buton people. The lives of these two community groups are well maintained and live together without any division between them.

**Keywords:** Society, Tribe, Adaptation, Interaction, Strategy, Integration.

## 1. Pendahuluan.

Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pangakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralism berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme di dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk budayanya. Budaya di dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena menjadi alat perekat di dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu, setiap negara memerlukan politik kebudayaan (Harrison and Huntington, 2000: 67). Bahkan Gandhi menunjukkan bahwa budaya sebagai alat pemersatu bangsa. Senada dengan itu, Soedjatmoko (1996) mengungkapkan Indonesia memerlukan adanya suatu politik kebudayaan sebagai upaya mengikat bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar.

Pluralisme masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis juga potensial bagi terjadinya konflik, karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural mereka, Menurut Ting Toomey (1999:30), identitas kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Menurut Roger & Stenfatt (1999:97), identifikasi kultural akan menentukan individu-individu yang termaksud dalam *ingroup* dan individu-individu yang termaksud dalam *outgroup*. Menurut Suparlan (2000:89), ia menilai bahwa isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.

Turnomo Raharjo (2005:10), masyarakat-masyarakat yang terbagi kedalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural akan sulit mencapai keterpaduan sosial (*social cohesion*). Hal ini terjadi karena masing-masing kelompok berada dalam lingkup pergaulan yang eksklusif sehingga relatif tidak intensif dalam melakukan komunikasi (antar budaya) yang efektif dimana komunikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahpahaman budaya (*cultural misunderstanding*), namun justru malah

cenderung melakukan penghindaran komunikasi (*communication avoidance*). Keterpaduan sosial yang dimaksud disini adalah kondisi yang memungkinkan masing-masing kelompok dapat menjalin komunikasi tanpa harus kehilangan identitas kultural mereka. Akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial ini, maka usaha untuk membentuk kehendak bersama (*common will*) sebagai suatu bangsa menjadi persoalan yang rumit dan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Perbedaan kepentingan sebenarnya merupakan sifat naluriah disamping adanya persamaan kepentingan. Bila perbedaan kepentingan itu terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya pada kelompok etnis, kelompok agama, kelompok ideology tertentu termasuk antara mayoritas dan minoritas. Maksudnya adalah pendapat atau kepentingan seseorang yang berbeda dengan yang lainnya. Terkadang bisa menyebabkan perdebatan yang bisa berakhir secara damai atau sebaliknya berakhir secara anarkis. Namun jika dicermati, perbedaan kepentingan dapat disiasati dengan saling bertoleransi dan meningkatkan solidaritas antar masyarakat agar bisa tetap hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik, yaitu (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang digunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut (Nasikun, 2010).

Kemajemukan akan menjurus ke arah konflik yang sangat potensial apabila faktor kemajemukan horizontal bersatu dengan faktor kemajemukan vertikal. Dengan kata lain, apabila suatu kelompok etnis tertentu tidak hanya dibedakan dengan kelompok etnis lainnya karena faktor-faktor "*ascribed*" lainnya seperti bahasa daerah, agama, dan lain-lain, tetapi juga karena perbedaan faktor "*achievement*" seperti ekonomi, pemukiman dan kedudukan politis, maka intensitas konflik akan dapat menjurus kepada suasana permusuhan. Sebaliknya, apabila kemajemukan faktor-faktor horizontal tidak diperkuat

oleh faktor-faktor vertikal, maka intensitas konflik sangat kecil dan mudah untuk dijuruskan kepada persesuaian atau harmoni.

Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan-persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal maupun vertikal pada tingkat nasional. Apabila mengikuti pandangan para penganut teori fungsionalisme-struktural, sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas landasan dua hal, yaitu: (1) konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental, dan (2) anggota-anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliation*), sehingga tumbuh *cross-cutting loyalties*, loyalitas yang silang-menyilang dari para anggota masyarakat terhadap kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial di mana mereka menjadi anggotanya. Ketika hal ini diterapkan di suatu masyarakat majemuk akan berhadapan dengan rendahnya kemampuan elemen-elemen dalam masyarakat majemuk membangun konsensus tentang nilai-nilai dasar. Sebagaimana dikemukakan oleh van den Berghe (*dalam* Nasikun, 2004), segmentasi ke dalam bentuk satuan-satuan sosial yang masing-masing terikat oleh ikatan-ikatan yang sifatnya primordial, mudah sekali menimbulkan konflik-konflik yang terjadi baik pada tingkat ideologis maupun politis. Pada tingkat ideologis, konflik tersebut terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh (serta menjadi ideologi) satuan-satuan sosial.

Pada tingkat politik, konflik-konflik di antara elemen-elemen dalam masyarakat majemuk terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Dalam situasi konflik, sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama: mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mengikuti pandangan Parsons, kelangsungan hidup masyarakat tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati bersama oleh sebagian besar orang, akan tetapi lebih dari itu, nilai-nilai umum tersebut harus pula dihayati benar melalui proses sosialisasi dan internalisasi (Parsons, 1952).

Munculnya rasa kesatuan Negara Republik Indonesia: Pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu, dan berbahasa satu, yang tumbuh sebagai hasil gerakan

nasionalisme pada permulaan abad ke-20 yang berjiwa anti-kolonialisme itu, merupakan konsensus nasional yang memiliki daya tiada terkira di dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai pada saat ini. Kemajemukan yang juga terdapat pada masyarakat di Maluku yakni; Pluralitas antara orang pendatang yang terdiri dari berbagai macam suku pula di dalamnya yang antara lain Jawa, Bugis, Buton, Sumatra, dan masih banyak suku bangsa yang lainnya yang mana pendatang ini juga mengalami sebuah proses adaptasi dan interaksi antara sesama pendatang namun mereka juga harus berinteraksi dan beradaptasi pula dengan orang asli. Orang pendatang adalah orang-orang yang datang dari luar daerah tersebut dengan berbagai macam kepentingan dan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, tinggal dan menetap di daerah tersebut.

Dalam konteks yang demikian ini maka Negeri Wakal saat ini didiami oleh suku asli sejak nenek moyang mereka tetapi pada tahun 1940, masyarakat Buton datang dan mendiami daerah tersebut dengan menempati Dusun Wa Hatu. Kedatangan Orang Buton di Negeri Wakal diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik yang berarti antara masyarakat asli Negeri Wakal dengan masyarakat pendatang (suku Buton) yang mendiami Dusun Wa Hatu yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara mereka.

Ada sebuah ungkapan yang lazim di dengar bahwa, taman bunga tidak akan indah kalau hanya diisi oleh satu warna dan satu jenis bunga saja. Malahan yang membuat taman bunga indah, karena banyak warna-warni bunga serta jenis yang beragam. Perbedaan itulah yang membuat taman bunga terlihat menarik. Jika perumpamaan taman bunga tadi dijadikan contoh dalam kehidupan, tentu mendapatkan perwujudannya secara logis. Sejatinya manusia hidup dengan perbedaan, baik dari latar belakang agama, ekonomi, etnis dan segala perbedaan lain yang membuat manusia hidup dalam keberagaman. Keberagaman tidak bisa dihindari, karena keberagaman adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Jangankan dari aspek luar yang tegas membuat perbedaan dari hal yang tidak kasatmata, perbedaan adalah keniscayaan, misalnya pikiran yang merupakan sesuatu yang tidak nyata akan berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sekali lagi berbeda adalah keniscayaan, bahkan perbedaan membuat hidup lebih indah.

Keberagaman yang ada pada masyarakat dan membentuk keduanya terpisah namun hidup dan berinteraksi dalam lingkup yang masih dalam satu wilayah dengan media-media komunikasi yang tentunya merupakan sarana interaksi dalam hidup bermasyarakat. Ruang interaksi masyarakat lintas budaya ini dapat dilihat di pasar,

perkantoran, gedung pertemuan, dan tempat-tempat keramaian lain, juga sarana pendidikan (kampus). Dua komunitas ini mengalami berbagai macam dinamika dalam proses interaksinya. Hal ini disebabkan karena masing-masing lintas budaya mempertahankan budayanya dan lebih memilih untuk tidak ikut campur terhadap lintas budaya yang lain. Orang pendatang adalah orang yang sudah menetap dan tinggal di suatu tempat atau daerah, namun mengidentifikasi diri mereka masih berdasarkan pada suku asal, hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antara orang pendatang dan orang asli. Apabila orang pendatang kemudian dapat membentuk relasi sosial dalam lingkup masyarakat asli dan beradaptasi dengan serta berinteraksi dengan orang untuk membuka diri dan mau menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar orang asli.

Seringnya bertemu masyarakat, dapat melahirkan hubungan sosial yang bersifat positif maupun negatif. Hubungan yang positif muncul bila pertemuan itu mampu menciptakan hubungan intraksional timbal balik secara harmonis dalam masyarakat yang baru. Kondisi ini bisa dicapai bila ada rasa saling menghargai dan mengakui keberadaan masing-masing kelompok etnis. Disamping itu, usaha untuk mengurangi dan memperlunak hal-hal yang menyebabkan timbulnya benturan atau konflik serta perasaan terbuka dalam bertoleransi, sangat diperlukan sehingga perbedaan-perbedaan yang tajam bisa dikurangi.

Menurut Budi Raharjo, hubungan yang bersifat negatif muncul jika pertemuan tersebut menimbulkan situasi hubungan interaksional yang tidak harmonis karena adanya perubahan sikap dan tingkat pengetahuan dari mereka dalam mengandung suatu objek yang menyangkut dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, pemaksaan suatu tata nilai ataupun norma baru oleh kelompok yang merasa mayoritas kepada kelompok minoritas akan mempermudah terjadinya pertikaian serta mempengaruhi masalah-masalah nilai budaya (Soumokil, 1992: 6)

Seringkali kehadiran orang lain dalam sebuah komunitas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, namun sering pula terjadi bahwa kedatangan mereka akan diterima dengan sikap yang tidak bersahabat. Hal ini timbul jika di dalam masyarakat sempat tumbuh dan berkembang prasangka terhadap para pendatang tentang sikap atau sifat-sifat tertentu yang tidak cocok. Sikap atau sifat-sifat tersebut biasanya bersumber pada perbedaan kesempatan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, perbedaan adat kebiasaan, bahasa, agama, atau perbedaan latar belakang budaya. Akan tetapi jika para pendatang dapat berbaur dan menerima berbagai kebiasaan dan latar belakang yang

berbeda, maka akan timbul hubungan yang harmonis di antara orang pendatang dengan orang asli.

Masyarakat asli di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang dapat menerima orang pendatang dengan baik dan tangan terbuka demikian pula masyarakat pendatang (Orang Buton), sebagai masyarakat pendatang dengan adat dan budaya yang berbeda dapat membangun hubungan interaksi antara kedua komunitas dengan baik, dan saling menghormati berbagai adat dan budaya yang berbeda antara mereka, sehingga mereka dapat hidup rukun sampai saat ini apabila terjadi konflik antara Orang Buton dan Orang Wakal, masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak meluas.

## **2. Metode Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, studi ini tidak menguji hipotesis secara statistik, tetapi menyelidiki, mengidentifikasi, atau menganalisis data yang ada dan mencari pilihan-pilihan yang tepat. Penelitian ini difokuskan pada pola integrasi antara Orang Buton dan Orang Wakal di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini tidak mewakili sebagai populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Oleh sebab itu, pengambilan data didasarkan atas pertimbangan tertentu (*purposive sampling*).

## **3. Temuan dan Pembahasan.**

Negeri Wakal secara administratif terdapat pada Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dan terletak di arah barat kabupaten Maluku Tengah. Negeri Wakal membawahi 5 (lima) dusun, yaitu: (1), Dusun Wa Hatu, (2), Dusun Lula/Waulu, (3), Dusun Oli Lama, (4), Dusun Waipot/Alimase, (5), Dusun Waringin Cap. Negeri Wakal memiliki batas-batas wilayah yang jelas yaitu, sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Hitu Messing, sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Hila, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Rumah Tiga.

### **3.1. Orang Buton di Dusun Wa Hatu.**

Tradisi pelayaran Orang Buton sudah tercatat dalam teks bangsa asing sejak ratusan tahun silam. Orang Buton sejak dulu telah menjadikan lautan ibarat kanvas yang kemudian dilukis dengan berbagai jejak dan penjelajahan. Seperti halnya bangsa maritim

lainnya, Orang Buton seakan mengamini petuah bangsa Bajo bahwa lautan adalah suatu wilayah luas yang bisa disinggahi siapa saja, bahwa di atas lautan, semua manusia berbaur menjadi satu dan saling belajar bagaimana menaklukan ombak demi menjaga keseimbangan perahu dan tidak tenggelam, bahwa lautan bukan sekedar air yang tenang dan bergelombang, namun mengasah kecakapan dan tradisi maritim untuk mengembangkan layar kebudayaan sebagai bentuk adaptasi dan penaklukan manusia terhadap alam semesta yang membentang. Inilah cikal-bakal dari tradisi maritim sebagai khasanah kekayaan Orang Buton yang dikenal luas di manca negara (Darmawan, 2008:108).

Jejak maritim Orang Buton sudah tercatat dalam berbagai laporan dan kesaksian para penjelajah. Sebagai penjelajah lautan, mereka telah sering berhadapan dengan debur ombak perairan Nusantara. Mereka punya tradisi dan kemampuan navigasi untuk mengarahkan *lambo* dan *sope-sope* menantang lautan. Lewat tradisi maritim itu, mereka bersentuhan dengan berbagai kebudayaan maritim dan mengkonstruksi tubuh kesultanan dengan analogi sebuah perahu dengan empat cadik. Tubuh perahu adalah kesultanan itu sendiri, sedangkan empat cadik (*barata*) adalah empat daerah yang menjadi lapis terluar yaitu Muna, Kulisusu, Tiworo, dan Kaledupa (Darmawan, 2008:110).

Kedatangan Orang Buton di Pulau Ambon, khususnya di Negeri Wakal Dusun Wa Hatu terjadi pada tahun 1940. Mereka kemudian diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Negeri Wakal, khususnya di Dusun Wa Hatu. Orang Buton yang mendiami Dusun Wa Hatu Negeri Wakal merupakan imigran yang berasal dari Wakatobi. Istilah Wakatobi adalah agronim dari kata-kata: *Wa* = Wangi-wangi, *Ka* = Kaledupa, *To* = Tomia, *Bi* = Binongko. Empat kata itu menunjuk pada empat pulau utama, yaitu; Pulau Wangi-wangi, pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan pulau Binongko. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh La Ode Maane Bolu bersama kawan-kawan pada tahun 1959 (Hendra, 2007:105).

Gugusan kepulauan yang membentang di bagian timur pulau Buton itu pada zaman Belanda dinamakan dengan istilah *Tookang Besi Eilanden* (kepulauan tukang besi). Istilah ini mula-mula dicetuskan oleh seorang Belanda yang bernama Hoger (Hendra, 2007: 106). Hal ini karena masyarakat yang tinggal di gugusan pulau tersebut mempunyai mata pencaharian utama sebagai tukang besi. Menurut La Ode Abubakar bahwa istilah tukang besi berasal dari nama Tulukabessi, Raja Hitu, yang pengikutnya diasingkan oleh Belanda ke pulau Wangi-wangi. Setelah mereka memberontak kepada



serdadu Belanda di pulau Wangi-wangi, mereka kemudian menyebar di pulau-pulau lainnya seperti Kalidupa, Tomia dan Binongko. Dari kata Tulukabessi itu kemudian orang-orang Belanda menyebut gugusan pulau-pulau tersebut dengan istilah kepulauan tukang besi (Hendra, 2007:114).

Secara geografis, Wakatobi adalah sebuah gugusan kepulauan kecil, terpencil, dan berada di antara pulau Buton dan Sulawesi di bagian Barat, Maluku di bagian Timur dan Utara, serta Nusa Tenggara di bagian Selatan. Kepulauan Wakatobi merupakan penghubung antara Laut Banda dan Laut Flores. Struktur kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau karang yang tidak cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai tukang besi dan pelaut atau nelayan.

Dalam kaitannya dengan laut, orang Wakatobi menganggap laut adalah tempat untuk mencari kehidupan. Sedangkan darat hanya merupakan tempat tinggal, barang siapa yang ingin menguasai wilayah Wakatobi maka harus menguasai laut. Oleh sebab itu fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu kala, orang kaya di Wakatobi adalah pelaut.

Sebagaimana pandangan Ligtoet yang menyatakan bahwa penduduk Buton lebih banyak menyandarkan diri pada pelayaran dan perdagangan sebagai sumber kehidupan. Ia menyebutkan bahwa penduduk Binongko telah dikenal sebagai pembuat perahu yang ulung. Di bagian Barat Orang Buton juga telah berlayar hingga ke Singapura dan memperdagangkan berbagai komoditas rempah-rempah dan hasil laut. Katika itu Buton juga telah terlibat dalam jaringan perdagangan budak. Arah perdagangan ini seperti ke wilayah Timur, Orang Buton sampai ke Maluku (Ambon, Banda, dan Seram). Kemudian mereka ke wilayah Utara sampai ke Filipina dan ke Selatan sampai di Utara Australia (Darmawan 2008:111).

Dalam melakukan pelayaran dan perdagangannya di berbagai wilayah maka Orang Buton akan bertemu serta hidup bersama dengan orang lain yang juga sebagai pendatang atau dengan warga asli di wilayah yang mereka datangi. Pertemuan Orang Buton dengan masyarakat lainnya dari berbagai etnis ini kemudian menyebabkan mereka harus menjalani kehidupan bersama dan menjadi satu kesatuan masyarakat yang multietnis sebagaimana yang tampak di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal.

### **3.2. Interaksi dan Integrasi.**

Realitas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat apapun, termasuk masyarakat multietnik selalu terjadi proses sosial yang bisa berbentuk konflik atau integrasi. Konflik dan integrasi merupakan bagian terintegral dari masyarakat multietnis. Latar belakang timbulnya integrasi maupun konflik dalam masyarakat multietnis perlu diidentifikasi dengan baik sehingga sisi penguat dan pelemah integrasi bermanfaat untuk menciptakan kedamaian bersama demi keutuhan NKRI (Pageh, 2009:18).

Maraknya konflik yang menerpa negeri ini tentu tidak bisa dilepaskan dari akibat adanya proses transisi yang tengah terjadi dalam masyarakat. Ketika norma lama tidak lagi bisa ditaati, sementara pada sisi lain, nilai-nilai baru belum utuh terbentuk, masyarakat malah mengalami lompatan budaya dari budaya agraris menuju masyarakat industri. Maka secara kasat mata dapat dilihat lunturnya solidaritas sosial dan menurunnya rasa kepedulian sosial, sementara sikap-sikap ego semakin merusak. Tampaknya cita-cita ideal yang didambakan oleh bangsa Indonesia bukanlah asimilasi ataupun difusi seperti tampak pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia di era Orde Baru yang kelihatan tegar dari luar namun sesungguhnya rapuh dari dalam sehingga mudah menimbulkan kerawanan sosial, menurut peneliti, situasi pluralisme bangsa Indonesia pada era Orde Baru berada dalam kondisi “stabil dalam ketidak stabilan”. Cita-cita ideal yang didambakan berupa integrasi yang berlandaskan pada pilar-pilar kebangsaan. Pilar-pilar kebangsaan yang dimaksud bukan saja Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai jiwa kekal yang menghidupkan raga Indonesia, namun juga pangajewantahan nilai-nilainya seperti UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

Integrasi yang menjadi cita-cita ideal bangsa Indonesia dalam hal ini adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Meminjam gagasan dari Trianto (2007:112) mengartikan integrasi sebagai integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial. Integrasi kebudayaan berarti penyesuaian antara dua kebudayaan atau lebih mengenai beberapa unsur kebudayaan yang bertentangan agar dapat dibentuk menjadi sistem kebudayaan yang harmonis. Sedangkan integrasi sosial berarti penyatupaduan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda menjadi satu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan jati diri masing-masing. Begitu pula dengan istilah pluralisme sosial yang diartikan sebagai pendekatan heterogenesis atau kebhinnekaan budaya dengan kebudayaan suku-suku bangsa dan

kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jati diri mereka dalam suatu masyarakat.

Lehman (*dalam* Suparlan,1984:10) mengatakan bahwa dalam interaksi antar kelompok etnis sebenarnya para pelaku itu “mengambil posisi dalam sistem secara kebudayaan”. Sistem kebudayaan itulah yang diidentifikasi sebagai acuan dalam mengatur hubungan-hubungan antar kelompok etnis yang ada. Akan tetapi kesanggupan individu pelaku tersebut dalam memanipulasi simbol-simbol identitas etnisnya juga sangat berpengaruh terhadap corak hubungan sosial yang terjadi. Dalam hal ini simbol-simbol etnis tersebut dimanipulasi dengan jalan mengaktifkan dan mendefinisikan kembali hubungan antar peranan di antara mereka.

Dalam konteks ini maka, kehidupan bersama antara Orang Buton di Dusun Wa Hatu dengan Orang Wakal telah terjadi berbagai bentuk interaksi dan integrasi. Bentuk-bentuk interaksi dan integrasi di antara mereka terjadi dalam berbagai kegiatan adat maupun kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi Orang Buton untuk tetap eksis dan menjalani hidup secara baik dengan Orang Wakal, khususnya yang bermarga Samal. Interaksi dan integrasi antara Orang Buton dan Orang Wakal yang bermarga Samal telah terjadi sejak mereka pertama kali tiba di Negeri Wakal.

Interaksi dan integrasi antara Orang Buton dan Marga Samal telah terjadi pada beberapa aspek kehidupan seperti, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Sejak kedatangan Orang Buton di Negeri Wakal, mereka kemudian diterima dengan baik dan diberi lokasi atau tanah untuk tempat tinggal di Dusun Wa Hatu yang merupakan milik Marga Samal. Setelah tinggal dan menetap di Dusun Wa Hatu, ternyata Orang Buton dapat melakukan adaptasi dan interaksi secara baik dengan Marga Samal. Wujud dari adanya adaptasi dan interaksi yang dilakukan oleh Orang Buton dengan Marga Samal adalah Orang Buton diberi kesempatan untuk menggunakan Marga Samal. Penggunaan Marga Samal oleh Orang Buton telah disetujui dan diakui oleh semua anggota keluarga yang bermarga Samal sehingga tidak ada dari mereka (Marga Samal) yang tidak menyetujui atau mengakui penggunaan marganya oleh Orang Buton.

Penggunaan Marga Samal oleh Orang Buton tentu saja sangat menguntungkan apabila dipandang dari aspek sosial dan politik. Dari aspek sosialnya adalah, dengan menggunakan Marga Samal maka Orang Buton dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas dan berbaur serta menyatu tanpa ada rasa perbedaan dalam lingkungan tempat

tinggal, khususnya dengan Marga Samal yang asli. Sedangkan dari aspek politiknya adalah, penggunaan Marga Samal merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Orang Buton untuk dapat hidup lebih dekat dengan Marga Samal yang asli dan warga Negeri Wakal pada umumnya. Selain itu, mereka juga dapat dengan bebas tanpa ada rasa keraguan untuk mengolah lahan milik Marga Samal sehingga mereka dapat tetap bertahan hidup (*survive*) di tanah milik Marga Samal.

Eksistensi Orang Buton di Dusun Wa Hatu setelah menggunakan Marga Samal ternyata telah membawa mereka untuk terlibat bersama dengan Marga Samal yang asli dalam berbagai kegiatan atau ritual adat yang dilakukan di Negeri Wakal. Dalam pelaksanaan ritual adat yang dilakukan di Negeri Wakal, Orang Buton yang menggunakan Marga Samal dapat terlibat bersama dengan Marga Samal yang asli. Selain itu, mereka juga memiliki tugas dan kewajiban serta posisi yang sama dengan Marga Samal yang asli dalam pelaksanaan ritual adat.

Misalnya, dalam ritual adat untuk perbaikan rumah bealeo, apabila Marga Samal yang asli mendapat tugas untuk mencari kayu untuk perbaikan tiang bangunan rumah baeleo maka tugas yang sama akan dilakukan juga oleh Orang Buton yang menggunakan Marga Samal. Selain itu, apabila ada sumbangan untuk biaya perbaikan rumah baeleo yang wajib diberikan oleh Marga Samal yang asli maka Orang Buton yang menggunakan Marga Samal juga wajib memberikan sumbangan yang sama dengan diberikan oleh Marga Samal yang asli. Begitu pula, dengan kedudukan atau posisi mereka dalam pelaksanaan ritual adat di Negeri Wakal. Orang Buton yang menggunakan Marga Samal memiliki kedudukan atau posisi yang sama dengan Marga Samal yang asli dalam pelaksanaan ritual adat. Hal ini menunjukkan bahwa Orang Buton yang menggunakan Marga Samal dalam kehidupannya di Dusun Wa Hatu tidak berbeda dengan Marga Samal yang asli, khususnya dari aspek sosial budayanya. Realitas yang demikian menunjukkan bahwa walaupun berbeda suku dan latar belakang budayanya namun antara Orang Buton dan Marga Samal dapat menjalani kehidupan bersama yang harmonis. Hal ini merupakan konsep hidup masyarakat monodualistis, yaitu mengakui adanya dua sifat yang berbeda namun tetap bersama dalam memelihara keseimbangan kosmos. Dua yang berbeda mewujudkan satu kosmos yang harmonis (Huliselan, 2005:231).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Orang Buton selain tinggal dan menetap di Dusun Wa Hatu, mereka juga dapat mengelola tanah milik Marga Samal untuk lahan pertanian. Pada lahan yang diberikan, mereka dapat menanam

berbagai jenis tanaman, baik tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pengelolaan tanah milik Marga Samal oleh Orang Buton untuk lahan pertanian ini juga dilakukan melalui satu kesepakatan bersama bahwa dari hasil pengelolaan lahan tersebut Marga Samal mendapatkan bagian sebanyak 20% dari hasil pertanian yang dikelola oleh Orang Buton. Kesepakatan ini pun diterima dan disetujui oleh Orang Buton sehingga dilaksanakan hingga sekarang. Dalam pengelolaan lahan pertanian ini juga, tidak ada syarat khusus yang diatur secara tertulis karena di antara mereka lebih mengutamakan adanya komitmen yang terbangun oleh adanya saling percaya. Realitas demikian menunjukkan bahwa terdapat nilai baru yang tumbuh di antara Orang Buton dan Orang Wakal, khususnya yang bermarga Samal berupa kepedulian, kebersamaan dan kerja sama. Internalisasi nilai integrasi sosial dan harmonisasi sosial dalam masyarakat yang meliputi kejujuran, kepedulian, toleransi serta perasaan saling membutuhkan berimplikasi terhadap pengejawantahan kehidupan yang harmonis antara Orang Buton dengan Orang Wakal pada umumnya.

### **3.3. Kerjasama Sebagai Perikat Integrasi.**

Bagi Orang Wakal, sifat gotong-royong sudah melembaga sejak lama sehingga menjadi pengukur bagi rasa keterikatan atau persahabatan seseorang dengan orang lain. Perkumpulan sosial dan hari-hari raya keagamaan mempunyai fungsi positif untuk mempertemukan Orang Wakal dan Orang Buton ke dalam relasi-relasi timbal-balik yang bermanfaat untuk mendorong proses integrasi sosial. Aktivitas-aktivitas sosial keagamaan ini berfungsi sebagai sarana sosialisasi untuk mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, jika individu dari masing-masing kelompok entis ikut berpartisipasi untuk mendukungnya. Dalam hal ini, warga masyarakat salah satu kelompok entis untuk ikut berpartisipasi akan mendasarkan diri pada pandangannya terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Mereka akan menilai sifat manfaat yang dirasakannya dan kemudian mereka akan menentukan tindakan selanjutnya. Karena untuk ikut serta dalam kehidupan bersama, individu dari masing-masing kelompok etnis diminta untuk menerima pandangan-pandangan serta sikap-sikap, kehidupan bersama. Namun, mereka akan mencerminkan sikap-sikap bersama serta respon-respon itu menurut cara pandang dan latar belakang mereka sendiri-sendiri secara khusus (Harbert, 1934:201).

Adanya pernikahan di antara mereka memungkinkan terjadinya pertukaran nilai antara kultur Orang Buton Wa Hatu dan Orang Wakal. Proses pertukaran nilai ini yang biasa disebut asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses dalam taraf kelanjutan, yang

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama. Walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan (Soekanto, 1998:74).

Nilai-nilai budaya yang tercipta dari hasil integrasi seperti saling memahami, menghormati dan adanya rasa saling membutuhkan merupakan acuan hidup bermasyarakat di Negeri Wakal antara orang asli dengan Orang Buton Wa Hatu. Hal ini terbukti dari sikap masyarakat yang tidak menganggap perbedaan kultur dan budaya merupakan hal yang dapat mengganggu proses integrasi diantara mereka. Semua elemen masyarakat di Negeri Wakal baik itu penduduk asli maupun pendatang, pemerintah maupun masyarakat biasa membuka tali silaturahmi dengan sangat baik kepada siapapun baik orang yang sudah lama berinteraksi dengan mereka maupun yang baru mereka kenal.

Sikap ramah tamah, saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, tolong-menolong dan besarnya rasa toleransi di dalam masyarakat menjadi pengikis banyaknya perbedaan yang terjadi di masyarakat. Adanya pemahaman bahwa di Negeri Wakal berkembang justru dengan kedatangan para pendatang membuat satu ikatan batin antara penduduk asli dengan pendatang. Apalagi sekarang, banyak dari mereka yang sudah terbiasa dengan suku bangsa dan agama lain karena dari kecil sudah berinteraksi satu sama lain. Para pendatang pun (Orang Buton Wa Hatu) sudah menganggap Negeri Wakal sebagai kampung halamannya, bahkan sudah banyak dari keturunan mereka yang lahir dan besar di Negeri Wakal.

### **3.4. Bahasa Sebagai Perekat Integrasi.**

Orang Buton sebagai makhluk sosial menjalani hidup bersama dan berinteraksi dengan masyarakat Wakal. Orang Buton sebagai anggota masyarakat Wakal tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat Wakal dan masyarakat lainnya. Salah satu media interaksi yang penting dalam kehidupan bersama ini adalah bahasa. Orang Buton di Dusun Wa Hatu dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat Wakal selalu menggunakan bahasa melayau yang umumnya berlaku dan digunakan oleh masyarakat Wakal. Dengan menggunakan bahasa yang sama maka

mereka akan lebih mudah dalam berinteraksi dan dapat menyatakan pikiran, perasaan serta keinginan bersama.

Menurut Badudu bahwa pikiran, perasaan dan keinginan tidaklah mempunyai arti sebelum dinyatakan dengan bahasa, diketahui, ditanggapi dan diberi reaksi oleh masyarakat lainnya. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa yang paling mendasar adalah fungsi komunikatif, yaitu tata pergaulan dan perhubungan sesama manusia (Nababan, 1991:48)

Bahasa merupakan suatu sistem struktur yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Salah satu bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang notabene sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Studi bahasa merupakan suatu studi yang memperhatikan (a) struktur bahasa sebagai kode, (b) mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan individu, (c) studi bahasa menitik beratkan analisis sebagai bagian dari kebudayaan manusia, dan (d) studi bahasa mengutamakan telaah bahasa sebagai gejala sosial. Dalam kajian ini studi bahasa dikaitkan dengan pemakaiannya di masyarakat. Kajian ini disebut *sosiolinguistik*. Kajian *sosiolinguistik* ini memandang bahasa (1) sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Kajian ini pun mengkaji studi bahasa sebagai bentuk sosial yang terjadi dalam situasi konkret (Appel, 1976:9).

Bahasa sebagai alat komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Objektivitas yang umum dalam kehidupan sehari-hari dipertahankan oleh signifikansi bahasa. Sebagaimana kemampuannya untuk mentransendensikan kenyataan, bahasa menjembatani wilayah-wilayah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan mengintegrasikannya ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna (Berger dan Luckmann, 1970:52-54).

Dengan demikian melalui bahasa seluruh "dunia" bisa diaktualisasikan setiap saat. Daya transedensi dan interaksi bahasa tetap ada sekalipun individu salah satu kelompok etnis tidak benar-benar sedang berhadapan dengan individu kelompok etnis lain dalam satu situasi tatap muka. Dalam proses interaksi pada masyarakat majemuk, dibutuhkan rasa toleransi antara masyarakat dalam upaya mempercepat terjadinya integrasi sosial. Interaksi diartikan sebagai hubungan timbal-balik antara individu dalam pergaulannya, dimana interaksi sosial adalah merupakan kunci dari semua aktivitas-aktivitas kehidupan sosial. Sehubungan dengan pernyataan ini, dikemukakan bahwa

interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi tak mungkin ada kehidupan sosial (Soekanto, 1998: 66).

Sementara modal dasar dari terjadinya integrasi dalam masyarakat adalah adanya interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif dan upaya membangun kepercayaan di antara masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perbedaan lainnya. Sejalan dengan teori fungsional struktural yang menyatakan masyarakat harus dilihat sebagai satu sistem yang komponennya berhubungan, bergantung, dalam saling mengkait yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk equilibrium yang bersifat dinamis. Apabila ada pertentangan, akan muncul nilai budaya yang akan mengintegrasikannya. Sangat terlihat dalam pola bermasyarakat yang terjadi di Negeri Wakal antara Orang Wakal dengan Orang Buton Wa Hatu. Kemajemukan yang meliputi suku, budaya dan kebiasaan justru mendorong Orang Buton Wa Hatu untuk menjaga kerukunan hidup diantara mereka dan berintegrasi satu sama lain dengan menjadikan mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Orang Wakal. Beranjak dari kenyataan di atas maka dasar suatu integrasi sosial adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Setiap anggota kelompok atau individu yang berbeda disatu padukan untuk mencapai tingkat yang harmonis, stabil, dan terjamin ketenangan hidupnya.

### **3.5. Perkawinan Sebagai Perekat Integrasi.**

Proses integrasi sosial di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat betul-betul memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempersatukan kehidupan sosial mereka dan menentukan arah kehidupan masyarakat menuju integrasi sosial. Faktor-faktor sosial tersebut antara lain tujuan yang ingin dicapai bersama, sistem sosial yang mengatur tindakan mereka, dan sistem sanksi sebagai pengontrol atas tindakan-tindakan mereka. Selain itu, dengan mereka dapat saling mengisi kebutuhan satu sama lain dan mencapai konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang konsisten dan tidak berubah-ubah dalam waktu singkat. Dengan demikian anggota-anggota masyarakat selalu berada dalam keadaan yang stabil dan terikat dalam integrasi kelompok.

Kekerabatan yang terjadi akibat adanya perkawinan diantara masyarakat asli dan pendatang yang berbeda suku bangsa, menyebabkan terjadinya proses interaksi yang semakin meluas di antara kedua pasangan dan pihak-pihak keluarganya. Hubungan kekerabatan diantara mereka yang berbeda suku dan budaya pun bisa ditemukan di daerah ini. Karena dalam kenyataannya, perbedaan suku, adat dan budaya tidak menjadi



persoalan bagi hubungan sosial kemasyarakatan di Wakal, sebab masyarakat menganggap bahwa perkawinan semacam itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat yang majemuk. Hal ini juga di dorong faktor kerukunan hidup antar Orang Wakal dan Orang Buton Wa Hatu yang relatif tinggi dan tidak ditemuinya sikap fanatisme pada perbedaan suku dan budaya antara mereka di Negeri Wakal.

Dalam kehidupan manusia yang dianggap penting yang meliputi kelahiran, perkawinan dan kematian. Upacara-upacara tersebut berdasarkan pada tradisi atau adat yang dianut oleh masyarakat dan bersumber pada ajaran agama dan adat yang mereka percaya. Disamping itu, dalam upacara kematian dan perkawinan, hubungan antar Orang Wakal dengan Orang Buton Wa Hatu juga terjalin dengan baik pada upacara kelahiran (aqiqah), sunatan, keberangkatan dan kepulangan menunaikan ibadah haji, dan upacara hajatan yang lain. Hubungan-hubungan tersebut tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan suku, adat dan budaya diantara mereka.

Perkawinan antar etnis terjadi karena adanya interaksi sosial antara dua orang atau lebih berbeda suku bangsa yang berlangsung diberbagai tempat dan kesempatan memperlihatkan bahwa ada interaksi sosial terkait kepentingan bersama sesaat (*temporary interaction*), sebagaimana tampak pada kasus interaksi sosial pada umumnya. Selain itu, ada interaksi sosial yang terkait kepentingan bersama dalam jangka waktu lama (*Longtime Interaction*). Dalam hal terakhir, kepentingan tersebut dapat dilihat pada kasus interaksi sosial yang mengujung pada sebuah peristiwa hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan, yang biasa disebut dengan istilah perkawinan.

Ikatan perkawinan antara Orang Wakal dengan orang Wa Hatu telah menyebabkan hubungan antara Orang Wakal dengan orang Wa Hatu semakin dekat. Seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Kellner (*dalam Soumokol 1992:149*), sudah barang tentu bahwa kelompok kecil yang intim seperti pasangan mempelai membiarkan individu untuk menginternalisir dirinya dalam realitas perkawinan dan berusaha membuat satu dunia dimana mereka bisa merasa betah. Keluarga merupakan satuan sosial yang terbangun sebagai akibat dari peristiwa perkawinan lintas keakraban.

Dalam konteks perkawinan Orang Wakal dengan Orang Buton Wa Hatu, secara kasad indrawi, anggotanya terdiri atas Orang Wakal dengan Orang Buton Wa Hatu secara keseluruhan. Ini berarti sebagian Orang Buton Wa Hatu memiliki kemampuan untuk bergerak keluar konteks masyarakatnya sendiri menuju konteks masyarakat yang lain. Praktek hidup di dalam masyarakat lain menjadikan Orang Buton Wa Hatu yang

memasuki adat Orang Wakal. Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, perkawinan dapat memudahkan terjalinnya hubungan sosial yang akrab. Hubungan ini selanjutnya memupuk sikap tengga rasa mengenai hal-hal tertentu yang berbeda pada masing-masing kelompok. Di samping itu, pengalaman hidup bersama dalam suatu perkawinan campuran akan memungkinkan hilangnya prasangka yang ada diantara mereka. Kondisi seperti ini sangat berpotensi untuk mendorong terbentuknya integrasi sosial, karena perbedaan latar belakang sosial yang ada tidak lagi menjadi kendala utama untuk membangun kehidupan berdampingan secara serasi.

#### **4. Kesimpulan.**

Integrasi sangat diperlukan di dalam masyarakat yang multikultural agar tercapai suatu kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada rasa saling membutuhkan akan kelebihan yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang lain. Selain itu harus ada rasa saling menghargai akan perbedaan yang timbul dalam masyarakat. Apabila itu bisa dijalankan dengan baik maka integrasi akan tercapai. Demikian maka berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat dikemukakan beberapa pokok-pokok pikiran sebagai generalisasi atau kesimpulan dalam penulisan ini.

- Pada aspek sosial, interaksi antara Orang Buton dan Orang Wakal terjadi dengan baik sehingga Orang Buton dapat menggunakan Marga Samal dalam kehidupan sehari-hari.
- Penggunaan Marga Samal oleh Orang Buton menunjukkan adanya identitas baru yang dimiliki Orang Buton di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal.
- Proses kawin-mawin antara Orang Buton dan Orang Wakal, khususnya dengan Marga Samal merupakan suatu bentuk interaksi dan integrasi yang telah terjadi hingga saat ini.
- Pada aspek budaya, Orang Buton dan Orang Wakal, khususnya yang Marga Samal terlibat bersama serta memiliki kewajiban yang sama dalam proses ritual adat.
- Pada aspek ekonomi, Orang Buton diberikan kesempatan oleh Marga Samal untuk mengolah tanah yang mereka tempati sebagai lahan pertanian dengan kesepakatan bahwa dari hasil yang diperoleh maka Marga Samal harus mendapatkan bagian sebanyak 20%.
- Interaksi yang terjadi dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh Orang Buton dengan Orang Wakal, khususnya Marga Samal merupakan strategi integrasi Orang Buton supaya mereka dapat tetap bertahan hidup (*survive*) di Dusun Wa Hatu Negeri Wakal.

### Daftar Pustaka.

Affandi Ikhwan Hakimul, 2004; *Akar Konflik Sepanjang Zaman “Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ali Muhamad, 2003; *Teologi Pluralis-Multikultural “Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan”*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Almond, Gabriel A. 1985. *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi* dalam Muchtar Masoed, dan Clon Mac Andrews (ed), *Perbandingan Sistem Politik*, UGM, Yogyakarta.

Blau, Peter M, 1997, *Inequality and Heterogenity A Primitive Theory Social Stucture*. New York: The Free Fress.

Bohannan dan Mark Glazer, 1973, *High Points in Antropology*. New York: Alfred A Knof.

Buggers, R.G. 1985, *Strategies of Educational Research Qualitative Methods*. London & Philadelphia: The Falmer Press.

Christopher, Daniel L.Smith (editor), 2005, *Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*. Kanisius. Yogyakarta.

Coser, Lewis A, 1956, *“The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.

Darmawan, Yusran, 2008, *Orang Buton dan imajinasi sejarah*. FISIP Universitas Indonesia.

Dibyorini, MC.Candra Rusmala .2005. *“Solidaritas Sosial dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia”*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial Alternatif, Volume VI, Nomor 12 , Desember 2005, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta.

Doyle, Paul. 1986. *Teori sosiologi klasik dan modern*, PT. Gramedia, Jakarta.

Geertz, Clifford. 1963, *Old Societies and New States: The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. The Free Press of Glencoe. New York.

Gerungan, W.A, 2004, *Psikologi Sosial*, PT Rafika Aditama, Bandung.

- Giddens Anthony, 2009; *Problematika Utama Dalam Analisis Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goodman Douglas.J dan Ritzer George, 2008; *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Hanafi Rita dan Soetriono, 2007; *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta.
- Hefner Robert .W, 2007; *Politik Multikulturalisme*, Kanisius, Yogyakarta
- Hendrarso, Emi Susanto. 1985. *Penelitian Kualitatif* (dalam Bagong Suyanto dkk (ed), *Metode Penelitian Sosial*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Huliselan M, 2005, “*Berdampingan Dalam Perbedaan Konsep Hidup Anak Negeri*” Maluku Menyambut Masa Depan”, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Idris, La Malik, 2008, *Dakwah dalam Masyarakat Plural : Peranan Tokoh Agama dalam Memelihara Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama di Kendari*. Disertasi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Kamanto, Sunarto, 2000. Pengantar sosiologi, Jakarta Fakultas Ekonomi UI.
- Koetjaraningrat. 1993, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Korten, David C. 1985, *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Mahdi Waruno, 2004; *Rekonsiliasi dan Integrasi*, Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Mahfud Choirul, 2010; *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasikun, 2010. *Struktur masyarakat majemuk Indonesia*, Grafiti Perss. Yogyakarta.
- , 2004, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parsons, Talcott. 1952, *The Social Systems*. London: Tavistock.
- Rahardjo, C. B. 1984, *Benturan Nilai-Nilai Budaya di Daerah Transmigrasi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

- Pamungkas, C. 2005, *Interaksi sosial antar umat beragama di Maluku: Sebelum dan sesudah konflik sosial 1999*, Dalam masyarakat Indonesia – majalah ilmu-ilmu sosial Indonesia Jilid XXXXI, No. 1, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pariela Tonny.D, 2008, *Damai ditengah konflik Maluku*, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana press.
- Poloma Margareth, 1987, *sosiologi kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1994, *sosiologi kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo Turnomo, 2003; *Menghargai Perbedaan Kultural “Mindfulness Dalam Komunikasi Antar Etnis”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritzer, 2004. *Teori sosial post modern*, Kreasi Wacanana, Jogjakarta.
- Rozi Syafuan.Dkk, 2006; *Kekerasan Komunal “Anatomi dan Resolusi Konflik”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rubin Z. Jeffrey dan Pruitt G. Dean, 2009; *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarapung Elga; *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian “Studi Bersama Antar Iman”*, tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Sauqi Ahmad dan Naim Ngainun, 2010, *Pendidikan Multikultural “Konsep dan Aplikasi”*, Ar – Ruzz Media, Jogjakarta.
- Soumokil, T, 1992, *“Integrasi Sosial antar Etnis Ambon dan Jawa di unit Pemukiman Transmigrasi”*, Kecamatan Kairatu-Kabupaten Maluku Tengah, (Tesis Magister Sosiologi, Universitas Indonesia).
- Sztopmka Piotr, 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Grop. Jakarta.
- Suekanto, Soerjono, 1983. *Teori sosiologi tentang perubahan sosial*, Ghalia Indonesia. Jakarta